

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KEBUMEN

Roudlotul Jannah

Roudlotuljannah013@gmail.com

Prodi D3 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017 serta tingkat efektivitas dan efisiensi program-program pada BAPPEDA Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Penelitian dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) efektivitas anggaran belanja tahun 2014 sebesar 95,88%; tahun 2015 sebesar 96,69%; tahun 2016 sebesar 93,60%; dan tahun 2017 sebesar 94,04%. Anggaran belanja secara keseluruhan dikatakan sudah efektif. Program paling efektif pada tahun 2014 adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar 98,64%; tahun 2015 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 99,34%; tahun 2016 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 98,28%; dan tahun 2017 adalah program perencanaan sosial budaya sebesar 98,68%. Program secara keseluruhan dikatakan sudah efektif. (2) Efisiensi anggaran belanja tahun 2014 sebesar 58,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efisien; tahun 2015 sebesar 63,37%; tahun 2016 sebesar 62,66%; dan tahun 2017 sebesar 61,92% dan termasuk dalam kriteria efisien. Program paling efisien pada tahun 2014 adalah program kerjasama pembangunan mencapai persentase sebesar 2,67%; tahun 2015 adalah program kerjasama pembangunan sebesar 1,76%; tahun 2016 adalah program perencanaan wilayah dan sumber daya alam sebesar 0,45%; dan tahun 2017 adalah program kerjasama pembangunan prosentase sebesar 1,47% dan secara keseluruhan masuk kriteria sangat efisien.

Kata kunci: anggaran belanja, efektivitas, efisiensi.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, dimana mencakup semua kegiatan dalam unit satuan moneter yang aktif dalam periode atau jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan

dana milik masyarakat. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja pemerintah, akan dilihat anggaran yang telah dibuat dapat berperan positif sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran yang dibuatnya. Sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah yang menyentuh pada fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berwujud dalam belanja modal harus mendapatkan porsi yang relatif besar. Namun, apabila kita lihat dari sudut pandang manajemen keuangan, kepala daerah di sebuah pemerintah daerah ternyata menghadapi kondisi yang cukup berat dalam mengelola sebuah belanja modal dari sisi pendanaannya maupun pengalokasiannya. Kegiatan belanja modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan penganggaran sering timbul masalah dalam realisasi suatu anggaran, termasuk belanja modal. Permasalahan sering muncul pada penatausahaan atas transaksi yang ditimbulkan, atau secara spesifik menyangkut masalah perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang sering mendapatkan koreksi dari BPK.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kebumen serta Kebijakan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahunan disusun berdasarkan program prioritas SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017?
- b. Bagaimanakah tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017?
- c. Bagaimanakah tingkat efektivitas dan efisiensi program-program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah target dan realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014 sampai dengan 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017.
- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi program kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Menurut Bahtiar (2011:123), anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diukur dalam satu satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai suatu belanja tersebut.

2.2 Belanja

Menurut Tanjung (2012:90), belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.3 Jenis – Jenis Belanja

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari: gaji dan tunjangan.

2.4 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*)”.

2.5 Efisiensi

Menurut Kurniawan (2005:111), Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Disini dapat dikatakan apakah tahun ini belanja pemerintah daerah relatif efisien atau tidak dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika efisiensi rasionya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya peborosan anggaran.

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan Veteran, No 2, Kebumen - 54311.

3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan pencatatan data serta pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.

b. Metode Observasi

Penulis melakukan observasi dengan cara meninjau langsung dan melakukan pengamatan dilokasi untuk mendapatkan data-data yang akurat. Data-data tersebut berupa laporan target belanja dan laporan realisasi belanja di BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

c. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Seperti data tabel dan data pendukung lainnya yang berkaitan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Data kuantitatif berupa Target Anggaran Belanja, Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014-2017 serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan target

belanja dengan realisasi belanja langsung yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2014-2017.

a. Efektivitas

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara target anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensinya yang dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel III.1 Rasio Efektivitas

Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : Sumenge (2013:77)

b. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel III.2 Rasio Efisiensi

Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	<60%

Sumber : Sumenge (2013:78)

PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel IV.1 Rasio Efektivitas

Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : Sumenge (2013:77)

Tabel IV.2 Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	2.624.951.000	2.558.998.177	97,48	Efektif
	Gaji dan Tunjangan	2.624.951.000	2.558.998.177	97,48	Efektif
2.	Belanja Langsung	3.746.035.000	3.549.580.767	94,75	Efektif
	Belanja Pegawai	729.376.000	693.542.800	95,08	Efektif
	Belanja Barang Dan Jasa	2.639.401.000	2.494.303.467	94,50	Efektif
	Belanja Modal	377.258.000	361.734.500	95,88	Efektif
	Jumlah Belanja	6.370.986.000	6.108.578.944	95,88	Efektif

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel IV.2 hasil perhitungan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 prosentasenya sebesar 95,88%. hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Bappeda sudah dikatakan efektif. Efektivitas penyerapan belanja tahun 2014 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki selisih prosentase sebesar 2,73%. Tingkat efektivitas anggaran dan realisasi belanja tidak langsung bagian gaji dan tunjangan untuk para pegawai Bappeda sebesar Rp. 2.558.998.177 atau mencapai 97,48%. Sedangkan untuk bagian belanja langsung yang terdiri atas belanja

pegawai dengan prosentase 95,08%. Belanja barang dan jasa dengan prosentase 94,50%, serta belanja modal dengan prosentase 95,88%. Belanja Langsung yang realisasinya paling efektif adalah pada bagian belanja modal sebesar Rp. 361.734.500 atau mencapai 95,88%.

Tabel IV.3 Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	2.811.800.000	2.788.744.062	99,18	Efektif
	Gaji dan Tunjangan	2.811.800.000	2.788.744.062	99,18	Efektif
2.	Belanja Langsung	5.063.836.000	4.826.254.032	95,30	Efektif
	Belanja Pegawai	234.716.000	233.971.600	99,68	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	4.326.162.000	4.091.677.182	94,57	Efektif
	Belanja Modal	502.958.000	500.605.250	99,53	Efektif
Jumlah Belanja		7.875.636.000	7.614.998.094	96,69	Efektif

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel IV.3 hasil perhitungan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2015 prosentasenya sebesar 96,69%. Hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Bappeda sudah dikatakan efektif. Efektivitas penyerapan belanja tahun 2015 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki selisih prosentase sebesar 3,88%. Tingkat efektivitas anggaran dan realisasi belanja tidak langsung bagian gaji dan tunjangan untuk para pegawai Bappeda sebesar Rp. 2.788.744.062 atau mencapai 99,18%. Sedangkan untuk bagian belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, Belanja Langsung yang realisasinya paling efektif adalah pada bagian belanja pegawai sebesar Rp. 233.971.600 atau mencapai 99,68%.

Tabel IV.4 Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	3.629.782.000	3.463.456.419	95,41	Efektif
	Gaji dan Tunjangan	3.629.782.000	3.463.456.419	95,41	Efektif
2.	Belanja Langsung	6.293.926.000	5.821.029.390	92,48	Efektif
	Belanja Pegawai	1.362.337.000	1.306.956.900	95,93	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	4.801.039.000	4.385.122.490	91,33	Efektif
	Belanja Modal	130.550.000	128.950.000	98,77	Efektif
Jumlah Belanja		9.923.708.000	9.289.458.809	93,60	Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel IV.4 hasil perhitungan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2016 prosentasenya sebesar 93,60%. Hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Bappeda sudah dikatakan efektif. Efektivitas penyerapan belanja tahun 2016 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki selisih prosentase sebesar 3,88%. Tingkat efektivitas anggaran dan realisasi belanja tidak langsung bagian gaji dan tunjangan untuk para pegawai Bappeda sebesar Rp. 3.463.456.419 atau mencapai 95,41%. Sedangkan untuk bagian belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, Belanja Langsung yang realisasinya paling efektif adalah pada bagian belanja modal sebesar Rp. 128.950.000 atau mencapai 98,77%.

Tabel IV.5 Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	3.674.656.000	3.398.758.939	92,49	Efektif
	Gaji dan Tunjangan	3.674.656.000	3.398.758.939	92,49	Efektif
2.	Belanja Langsung	5.818.214.000	5.528.518.687	95,02	Efektif
	Belanja Pegawai	1.267.348.000	1.180.465.900	93,14	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	4.198.633.000	4.007.282.787	95,44	Efektif
	Belanja Modal	352.233.000	340.770.000	96,74	Efektif
Jumlah Belanja		9.492.870.000	8.927.304.626	94,04	Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel IV.5 hasil perhitungan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2017 prosentasenya sebesar 94,04%. Hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Bappeda sudah dikatakan efektif. Efektivitas penyerapan belanja tahun 2017 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki selisih prosentase sebesar 2,53%. Tingkat efektivitas anggaran dan realisasi belanja tidak langsung bagian gaji dan tunjangan untuk para pegawai Bappeda sebesar Rp. 3.398.758.939 atau mencapai 92,49%. Sedangkan untuk bagian belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, Belanja Langsung yang realisasinya paling efektif adalah pada bagian belanja modal sebesar Rp. 340.770.000 atau mencapai 96,74%.

4.2 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen.

Tabel IV.6 Efektivitas Anggaran Belanja pada Program Bappeda

Tahun	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
2014	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	110.000.000	108.506.945	98,64	efektif
2015	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	558.338.000	554.680.750	99,34	efektif
2016	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.000.000	191.637.500	98,28	efektif
2017	Program Perencanaan Sosial Budaya	694.360.000	685.195.150	98,68	efektif

Sumber: Data diolah

Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efektivitas yang baik seperti Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut, serta Program perencanaan sosial budaya di tahun 2017.

4.3 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel IV.7 Rasio Efisiensi

Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	<60%

Sumber : Sumenge (2013:77)

1. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2014

$$= \frac{3.549.580.767,00}{6.108.578.944,00} \times 100\% = 58,10\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 58,10% hal ini berarti tingkat pelaksanaan anggaran belanja Bappeda sudah dikatakan sangat efisien.

2. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2015

$$= \frac{4.826.254.032,00}{7.614.998.094,00} \times 100\% = 63,37\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja tahun 2015 menunjukkan prosentase sebesar 63,37% hal ini berarti tingkat pelaksanaan anggaran belanja Bappeda sudah dikatakan efisien.

3. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2016

$$= \frac{5.821.029.390,00}{9.289.485.809,00} \times 100\% = 62,66\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja tahun 2016 menunjukkan prosentase 62,66% hal ini berarti tingkat pelaksanaan anggaran belanja Bappeda sudah dikatakan efisien.

4. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017

$$= \frac{5.528.518.687,00}{8.927.304.626,00} \times 100\% = 61,92\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja tahun 2015 menunjukkan prosentase 61,92% hal ini berarti tingkat pelaksanaan anggaran belanja Bappeda sudah dikatakan efisien.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja yang sudah dilakukan ditahun 2014 sampai dengan 2017, maka tingkat efisiensinya adalah seperti tabel IV.18 berikut ini:

Tabel IV.8 Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Bappeda Kabupaten Kebumen pada tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat efisiensi	Kriteria
2014	3.549.580.767	6.108.578.944	58,10%	Sangat Efisien
2015	4.826.254.032	7.614.998.094	63,37%	Efisien
2016	5.821.029.390	9.289.485.809	62,66%	Efisien
2017	5.528.518.687	8.927.304.626	61,92%	Efisien

Sumber : Data diolah

4.4 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kebumen.

Tabel IV.9 Efisiensi Anggaran Belanja pada Program Bappeda

Tahun	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kriteria
2014	Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000	94.757.880	2,67	Sangat efisien
2015	Program Kerjasama Pembangunan	90.000.000	85.044.650	1,76	Sangat efisien
2016	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	50.000.000	42.347.049	0,45	Sangat efisien
2017	Program Kerjasama Pembangunan	135.000.000	131.476.253	1,47	Sangat efisien

Sumber: Data diolah

Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik seperti Program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2014 dan 2015, Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam pada tahun 2016 dan Program Kerjasama Pembangunan tahun 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan prosentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. Efektivitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kriteria efektif.

Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efektivitas yang baik seperti Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut, serta Program perencanaan sosial budaya di tahun 2017.

Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tidak stabil yakni dari tahun 2014 sebesar 58,10%, tahun 2015 sebesar 63,37%, tahun 2016 sebesar 62,66%, dan tahun 2017 sebesar 61,92%. Dari ke empat tahun tersebut, hanya pada tahun 2014 lah pengeluaran anggaran belanja menduduki kriteria sangat efisien. Tiga tahun selanjutnya, yakni tahun 2015, 2016, 2017 anggaran belanja bappeda mengalami penurunan tingkat keefisienannya. Dan hanya masuk dalam kriteria efisien.

Beberapa program pada setiap tahun berjalan memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik seperti Program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2014 dan 2015, Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam pada tahun 2016 dan Program Kerjasama Pembangunan tahun 2017.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Semakin ditingkatkannya kinerja khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku instansi Pemerintah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan guna kepentingan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah Kabupaten Kebumen.
2. Kecenderungan tingkat efisiensi sebaiknya dipertahankan pada posisi sangat efisien tiap tahun melalui program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar, MuChlis, dan Iskandar.2011. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia. Jakarta.
- Bappeda Kabupaten Kebumen. 2018. www.bappeda.kebumenkab.go.id. 26 Mei 2018 (09.45)
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Deddi dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Ferina, I, S. Burhanudin, Dan Trisnawati, N, A. 2016. *Efektivitas Realisasi Dan Serapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah*

- Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan.*
- Gade, Muhammad. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Pemerintah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sumenge, A. Sharon. 2013. *Analisis Efisiensi Dan Efeektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasaselatan*. Jurnal Emba.1(3).78-81
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP. No71/2010*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*